



PKL Khawatir Tak

Bisa Berjualan Lagi

Dari Danais untuk Ganti
Traso dan Kabel Bawah Tanah

JOGJA, Radar Jogja – Revitalisasi jalur pedestrian kawasan Jalan Kyai Haji Ahmad (KHA) Dahlan sudah dimulai. Hanya beberapa PKL yang biasa berjualan di sana khawatir tak bisa kembali usai selesainya revitalisasi.

Pedagang kaki lima (PKL) yang sudah lima tahun berjualan di sana muncul kekhawatiran. Pasalnya, setelah penataan tidak lagi bisa berjualan di sana. Dia belum berencana pindah lahan untuk jualan angkringan. "Iya khawatir kalau gak bisa jualan lagi pasti. Kami punya tanggungan keluarga dan cicilan yang lain," kata seorang PKL, Urip Sardi Urip disela berjualan di Jalan KHA Dahlan kemarin (13/9).

Pria 42 tahun itu mengatakan sosialisasi dari wilayah kecamatan Gondomanan baru dilakukan sekali. Itu pun menurutnya sangat terlambat. Karena, sosialisasi dilakukan berbarengan dengan pengerjaan yang sudah dimulai segmen selatan sisi pojok timur. "Telat banget *wong* di sana sudah dikerjakan baru menggelar sosia-

lisasi," ujarnya yang menyebut PKL terbagi di dua wilayah yaitu Gondomanan dan Ngampilan.

Sosialisasi yang diterimanya baru sebatas informasi pengerjaan yang akan dilakukan secara bergantian per titik. Selama pengerjaan per titik itu, dia diminta untuk meliburkan diri dulu tidak berjualan. Terlebih situasi pandemi Covid-19 pendapatan menurun 40 persen dari biasanya Rp 100 ribu per hari. "Katanya di rapat kemarin target pekerjaan hampir tiga bulan. Masa selama itu kita gak jualan kita dapat uang makan darimana, kami repot mau kerja apa lagi," ujar ayah tiga anak.

Pun ia mengaku bukan merupakan PKL liar karena tergabung dalam sebuah paguyuban PKL KHA Dahlan Timur. Bersama kurang lebih 21 anggota lain. "Harapan kami ya tetap bisa berjualan, *dipapakke* mau ditaruh mana yang penting bisa jualan," harapnya.

Camat Ngampilan Tur Arya Warih mengatakan, larangan aktifitas para PKL di pedestrian Jalan KHA Dahlan belum disosialisasikan. Sosialisasi yang disampaikan baru sebatas pengerjaan fisik revitalisasi pedestrian. "Kemarin baru sosia-

lisasi untuk pengerjaannya. Tapi kalau *dawuh* Pemkot untuk seterusnya PKL enggak boleh lagi berjualan di sana setelah penataan," katanya yang menyebut wilayah Ngampilan sisi selatan terdapat empat PKL.

Imbuhnya, meski bagian pedestrian wilayah Ngampilan belum dilakukan pembongkaran. Namun, saat ini kecamatan tidak lagi mengeluarkan surat izin PKL. Pun perpanjangan izin juga tidak diproses. Selanjutnya, untuk pembinaan PKL lebih lanjut menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja. "Nah untuk pembinaan PKL lebih lanjut ke Disperindag," tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan, penataan pedestrian hanya sampai pada penggantian lantai traso dan perbaikan konstruksi bagian bawah. Sebelum menyentuh pedestrian, ada pembangunan konstruksi bawah yakni pembangunan saluran air limbah dan *ducting* saluran bawah tanah kabel fiber optik serta perbaikan saluran air hujan. Desain ini disesuaikan dengan

penataan pedestrian di Jalan Sudirman. "Tahun ini baru bisa selesai untuk konstruksi bawah sampai dengan penggantian lantai traso, traso ke atasnya belum termasuk *street furniture*-nya juga belum," katanya.

Umi menjelaskan pagu anggaran dana keistimewaan DIJ pengerjaan proyek ini belum bisa mencapai penyelesaian penataan pedestrian dengan melengkapi berbagai macam *street furniture*-nya. Pagu anggaran penataan pedestrian KHA Dahlan sekitar Rp 7,5 miliar. "Penggantian pedestrian dengan lantai traso karena jalur sumbu filosofi, kami meneruskan yang dari Titik Nol Kilometer. Di sini tidak ada pelebaran trotoar," jelasnya.

Waktu pelaksanaan pekerjaan fisik ini selama 105 hari terhitung pertengahan bulan September ini. Dalam mengantisipasi waktu pengerjaan yang terlalu mepet, kesiapan material sudah dipastikan sebelum penandatanganan kontrak. Pekerjaan dibagi dua segmen dengan dua kelompok pekerja. Pekerjaan dilaksanakan shift siang dan malam. "Penataan PKL setelah pedestrian jadi, masih menunggu kebijakan Pemkot," imbuhnya. (wia/prg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan Kemantren Ngampilan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005